



BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



LAPORAN SPIP

Biro Administrasi Pembangunan Daerah

SEMESTER I TAHUN 2024

Kunjungi kami :

**Biro Administrasi
Pembangunan Daerah
Setda Provinsi Jawa
Tengah**

Jl Pahlawan No 9 Kota
Semarang Gedung A Lt. 6
024-831-1173

Sosial Media :

instagram :
@bangda_jateng
website :
bangda.jatengprov.go.id
youtube :
BiroAdmBangdaProvJateng

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Ruang Lingkup	6
BAB II	7
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.....	7
Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I.....	7
BAB III	13
HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	13
BAB IV	14
MONITORING RISIKO DAN PENGENDALIAN	14
BAB V	
PENUTUP.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I.....	7
Tabel 4.1 Monitoring Risiko dan Pengendalian	14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Semester I Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Laporan ini memberikan gambaran pelaksanaan SPIP di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2024.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Berbagai saran terbuka untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang, Juli 2024

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**



ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA
NIP. 19710909 199603 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh Organisasi Instansi Pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola Pemerintah juga akan baik.

Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP.

Dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pimpinan

Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Unit Pemilik Risiko dalam hal ini OPD wajib membuat laporan penyelenggaraan SPIP tiap semester dan tahunan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000/67 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu:

1. Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan serta memantau rencana tidak pengendalian SPIP di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengevaluasi sistem pengendalian intern pemerintah di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah evaluasi atas sistem pengendalian intern pemerintah yang didasarkan pada RTP yang telah disusun dalam Dokumen Perencanaan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I

Tabel 2.1 Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	RTP	Waktu Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP (Terlaksana/Tidak Terlaksana)	Keterangan
1.	Pelaksanaan kegiatan APBN tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan	RSO.24.99.08.01	1. Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBN secara berkala	Semester I dan II Tahun 2024	Terlaksana	Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 1. Rakor Pengendalian Kegiatan APBN – 26 Maret 2024 2. Desk Pencermatan Rencana Kerja & Progres Kegiatan APBN – 26 April 2024 3. Melakukan monitoring/pemantauan lapangan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	RTP	Waktu Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP (Terlaksana/Tidak Terlaksana)	Keterangan
						4. Pemantauan Progres pelaksanaan secara daring baik melalui e-controlling, laporan manual SKPD pengampu, maupun melalui telepon
2.	Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tidak valid	RSO.24.99.08.02	1. Sosialisasi intens terkait gratifikasi melalui berbagai media 2. Internalisasi nilai-nilai budaya kerja	Semester II Tahun 2024	Belum Terlaksana	Kegiatan dilaksanakan semester II tahun 2024
3.	Sistem informasi yang dibuat oleh penyedia tidak sesuai dengan kontrak	RSO.24.99.08.03	1. Bekerja sama hanya dengan penyedia yang memiliki track record yang baik dan kompeten di bidangnya	Semester II Tahun 2024	Belum Terlaksana	Kegiatan dilaksanakan semester II tahun 2024
4.	Laporan pelaksanaan kegiatan dan	RSO.24.99.08.04	1. <i>Maintenance</i> secara rutin sistem aplikasi yang ada	1. Semester I Tahun 2024	1. Terlaksana	1. <i>Maintenance</i> dilakukan melalui pencermatan aplikasi <i>e-controlling</i>

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	RTP	Waktu Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP (Terlaksana/TidakTerlaksana)	Keterangan
	kinerja tidak lengkap dan informatif		2. Desk Rekonsiliasi data laporan pelaksanaan APBD 3. Desk Validasi capaian kinerja triwulanan 4. Asistensi dan konsultasi pelaporan kinerja dan pelaksanaan APBD	2. Semester II Tahun 2024 3. Semester I dan II Tahun 2024 4. Semester I dan II Tahun 2024	2. Belum Terlaksana 3. Terlaksana 4. Terlaksana	APBD kemudian dilaksanakan rapat dengan mengundang Tim GRMS. Adapun hal hal substansial dalam rapat tersebut yaitu kesiapan operasional aplikasi e-controlling APBD untuk pelaporan pelaksanaan APBD Tahun 2024, permasalahan rumus ketidaksesuaian, SSK 0 yang masih muncul dan realisasi keuangan SSK yang melebihi 100%. 2. Kegiatan dilaksanakan semester II tahun 2024 3. Evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Triwulan I yang dilaksanakan pada bulan April dan Triwulan II pada bulan Juli 4. Fasilitasi pemberitahuan OPD yang belum selesai

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	RTP	Waktu Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP (Terlaksana/Tidak Terlaksana)	Keterangan
						input progres realisasi fisik bulanan. Sampai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditentukan masih terdapat OPD yang belum menyelesaikan inputan.
5.	Rekomendasi kebijakan yang disusun tidak relevan dengan kondisi sumber daya yang ada	RSO.24.99.08.05	Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan rekomendasi kebijakan	Semester II Tahun 2024	Belum Terlaksana	Kegiatan dilaksanakan semester II tahun 2024
6.	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan	RSO.24.99.08.06	Mapping Biro-Biro lingkup Setda yang masih bermasalah dalam penyajian data kinerja untuk kemudian dilaksanakan	Semester I dan II Tahun 2024	Terlaksana	Mapping OPD/Kegiatan dilaksanakan pada saat pelaksanaan rapat evaluasi yang dilaksanakan berkala triwulan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	RTP	Waktu Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP (Terlaksana/Tidak Terlaksana)	Keterangan
			monitoring dan evaluasi			maupun pendampingan pada Biro terkait
7.	Ketidapatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	ROO.24.99.08.01	Memaksimalkan pelaksanaan pendampingan penggunaan aplikasi bantuan keuangan Desa	Semester I dan II Tahun 2024	Terlaksana	Melakukan pencermatan progres pada aplikasi bantuan keuangan kepada desa. Difokuskan pada Desa belum sama sekali melaporkan progres bantuannya pada aplikasi, kemudian dilakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan mendatangi ke kantor desa tersebut
8.	Laporan evaluasi capaian kinerja tidak lengkap dan informatif	ROO.24.99.08.02	Mapping OPD yang masih bermasalah dalam penyajian data kinerja untuk kemudian dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Semester I dan II Tahun 2024	Terlaksana	Mapping dilakukan melalui aplikasi <i>e-controlling</i> kinerja, kemudian desk dilaksanakan dengan mengundang seluruh OPD dengan tim desk dari Biro Bangda, Biro pengampu OPD dan Bappeda setiap

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	RTP	Waktu Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP (Terlaksana/TidakTerlaksana)	Keterangan
						triwulan. Adapun hal-hal yang dibahas dalam desk yakni: verifikasi, validasi, serta kelengkapan data input oleh OPD, pendalaman terkait indikator-indikator yang tidak mencapai target
9.	Anggaran DAK tidak tersalur sesuai tahapannya dari Pusat	ROO.24.99.08.03	Mapping OPD/kegiatan yang masih bermasalah dalam progres pelaksanaan DAK untuk kemudian dilaksanakan pemantauan dan evaluasi	Semester I dan II Tahun 2024	Terlaksana	Mapping OPD/Kegiatan dilaksanakan pada saat pelaksanaan rapat evaluasi maupun rapat koordinasi dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada paket-paket kegiatan DAK Fisik utamanya pada paket dengan pagu besar dan rawan kontrak kritis

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara garis besar pelaksanaan rencana tindak pengendalian pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah sudah direalisasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian antara lain :

1. Adanya perluasan substansi pengendalian yang mengacu pada Pergub Tupoksi Setda Provinsi Jawa Tengah, yang baru dilaksanakan pada tahun 2024 ini sehingga sumber daya yang ada masih belum cukup memadai.
2. Kondisi lapangan yang terkadang diluar kendali sehingga pengendalian terhadap risiko yang telah direncanakan dan dilaksanakan masih belum cukup optimal.

BAB IV

MONITORING RISIKO DAN PENGENDALIAN

Tabel 4.1 Monitoring Risiko dan Pengendalian

No	"Risiko" yang Teridentifikasi-kasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Skala Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala Risiko Residu setelah Dilakukan Pengendalian		
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian Pengendalian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
1.	Pelaksanaan kegiatan APBN tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan	RSO.24.99.08.01	Tahun 2024 Semester I	Pada paket kegiatan fisik konstruksi membutuhkan waktu cukup lama untuk proses pengadaan barang jasa sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi mundur	Output dan hasil kegiatan tidak optimal	4	4	16	Ada	Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBN secara berkala	Memadai	3	4	12
2.	Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tidak lengkap dan informatif	RSO.24.99.08.04	Tahun 2024 Semester I	Terdapat data progres realisasi fisik sub sub kegiatan yang belum diinputkan dengan batas waktu pelaporan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya	Data yang tersaji belum sepenuhnya memberikan gambaran dinamika progres pelaksanaan sub sub kegiatan	3	5	15	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Maintenance</i> secara rutin sistem aplikasi yang ada 2. Desk Rekonsiliasi data laporan pelaksanaan APBD 3. Desk Validasi capaian kinerja triwulanan 4. Asistensi dan konsultasi pelaporan kinerja dan pelaksanaan APBD 	Memadai	3	4	12

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Skala Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala Risiko Residu setelah Dilakukan Pengendalian		
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian Pengendalian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
3.	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan	RSO.24.99.08.06	Semester I Tahun 2024	Data tersedia secara tahunan	Data triwulanan sebelum adanya rilis dari pihak terkait sehingga masih menggunakan data tahun sebelumnya	3	5	15	Ada	Mapping Biro-Biro lingkup Setda yang masih bermasalah dalam penyajian data kinerja untuk kemudian dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Memadai	2	5	10
4.	Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	ROO.24.99.08.01	Semester I Tahun 2024	Pergantian user pelaporan tidak disertai transfer ilmu antara personil lama dengan yang baru	Data progres pelaksanaan bantuan keuangan desa kurang valid	4	4	16	Ada	Memaksimalkan pelaksanaan pendampingan penggunaan aplikasi bantuan keuangan Desa	Memadai	3	4	12
5.	Laporan evaluasi capaian kinerja tidak lengkap dan informatif	ROO.24.99.08.02	Semester I Tahun 2024	1. Pada saat melakukan input progress kinerja seringkali OPD belum lengkap atau melewati batas waktu input, hal ini dikarenakan data kinerja yang diinputkan harus melewati proses rekonsiliasi internal terlebih dahulu terutama untuk OPD dengan cabang dinas 2. Pada saat indikator tidak mencapai target yang ditetapkan,	1. Waktu pelaporan evaluasi yang disampaikan menjadi mudur 2. Informasi dari hasil evaluasi yang disampaikan kurang lengkap	4	5	20	Ada	Mapping OPD yang masih bermasalah dalam penyajian data kinerja untuk kemudian dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Memadai	4	3	12

No	"Risiko" yang Teridentifikasi-kasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Skala Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala Risiko Residu setelah Dilakukan Pengendalian		
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian Pengendalian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
				seringkali belum dilengkapi dengan alasan permasalahan ketidak tercapaian										
6.	Anggaran DAK tidak tersalur sesuai tahapannya dari Pusat	ROO.24.99.08.03	Semester I Tahun 2024	Tidak terpenuhinya dokumen persyaratan salur tahap I	Gagal salur	4	5	20	Ada	Mapping OPD/kegiatan yang masih bermasalah dalam progres pelaksanaan DAK untuk kemudian dilaksanakan pemantauan dan evaluasi	Belum Memadai	3	5	15

BAB V

PENUTUP

Secara umum penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Adapun persentase realisasi tindak pengendalian dan persentase efektivitas penanganan risiko pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah sampai dengan semester I sebagai berikut:

Persentase Realisasi Tindak Pengendalian

$$= \frac{\text{Realisasi Kegiatan Tindak Pengendalian}}{\text{Jumlah Kegiatan Rencana Tindak Pengendalian}} \times 100\%$$

$$= \frac{9}{13} \times 100\% = 69,23\%$$

Persentase Efektivitas Penanganan Risiko

$$= \frac{(\text{Jumlah Risiko} - \text{Jumlah Risiko diluar Risk Tolerance})}{\text{Jumlah Risiko}} \times 100\%$$

$$= \frac{6-1}{6} \times 100\% = 83,33\%$$

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**



ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA
NIP. 196710909 199603 1 006

LAMPIRAN

Dapat diunduh pada link
<https://bit.ly/LaporanSIPSMTI>